

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban Pengendalian Pencemaran dengan diwujudkan melalui tindakan penanggulangan terhadap limbah plastik harus diatasi dengan cepat karena telah mencemari lautan Indonesia dan sudah mengkontaminasi biota laut di dalamnya. Bahwa dalam hal tindakan penanggulangan pencemaran limbah plastik Pemerintah telah melakukan sesuai dengan kewenangannya dengan memberlakukan uji coba kantong plastik berbayar, namun kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan melihat hasil evaluasi yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut penulis hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dikaji atas validitas data yang didapat sebelum menjadi dasar pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri yang sah terkait pemberlakuan plastik berbayar. Kemudian uji coba terhadap pemberlakuan plastik berbayar masih terdapat ketidakharmonisan aturan di setiap daerah Kota di Indonesia. Terkait dengan tindakan pencegahan pencemaran yang telah diatur di dalam UUPPLH, belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu instrumen untuk melakukan pencegahan, namun sampai saat ini penegakan aturan terkait dengan pelanggaran di bidang lingkungan belum dijalankan dengan tegas. Pengawasan yang kurang terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, merupakan masalah yang berdampak pada pencegahan pertambahan limbah plastik.
2. Bahwa Perlindungan Keamanan Pangan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia yang perlu diwujudkan oleh pemerintah.

Dengan kondisi lautan yang tercemar limbah dan mengkontaminasi ikan-ikan konsumsi akan membahayakan Keamanan Pangan dari ikan-ikan yang berada di laut. Keamanan Pangan merupakan hal yang sangat esensial untuk pemenuhan gizi bagi masyarakat. Dengan berbagai aturan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keamanan Pangan harusnya cukup untuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan ikan konsumsi atas gizi, mutu, dan keamanannya. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak ikan yang terkontaminasi limbah plastik dan terjual di pasaran. Adanya beberapa kekosongan hukum dalam mengatur pengelolaan jaminan Keamanan Pangan khususnya terkait pengawasan dan pelaporan merupakan salah satu kendala yang harus segera diatasi oleh Pemerintah. Selain itu pengawasan pelaksanaan jaminan keamanan pangan hasil perikanan sampai saat ini tidak jelas dilaksanakan sehingga pengendalian keamanan pangan pun tidak ditegakan. Oleh sebab itu Pemerintah sampai saat ini belum bisa memberikan jaminan sepenuhnya atas ketersediaan Keamanan Pangan dari ikan-ikan laut.

5.2 Saran

1. Dalam evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan validitas data perlu dikaji ulang agar mendapatkan validitas yang sempurna. Akan sangat berbahaya apabila data yang diambil tidak teruji kevaliditasannya, dan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar Pemerintah menerbitkan kebijakan. Untuk itu uji coba kantong plastik berbayar harus di kaji ulang apakah dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan limbah plastik, sebelum diterbitkannya peraturan menteri yang mengatur plastik berbayar.
2. Apabila pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur plastik berbayar, harus merujuk kepada asas keadilan dalam pemberlakuan peraturan menteri dan mengikat pemerintah Kota. Pasalnya perbedaan harga di beberapa Kota mengindikasikan ketidakadilan pemberlakuan hukum di beberapa

Kota. Asas otonomi daerah dalam menentukan kebijakan khusus di daerah menurut penulis tidak proporsional digunakan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, mengingat tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah setara.

3. Pemerintah juga perlu menggunakan beberapa upaya yang telah di atur di dalam aturan Perundang-undangan dalam rangka penanggulangan pencemaran salah satunya dengan mengisolasi wilayah-wilayah yang tingkat pencemarannya tinggi. Isolasi yang dilakukan juga harus sesuai aturan hukum dengan berkoordinasi dengan kementrian-kementrian terkait agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana
4. Pengawasan atas jaminan keamanan pangan dan mutu hasil perikanan harus dilakukan dengan ketat dengan mengawasi kegiatan mulai dari penangkapan ikan , pengolahan ikan, sampai kepada pendistribusian melalui *log book* atau dokumen yang wajib dibuat oleh seluruh pengusaha ikan, sehingga dapat memastikan kewananan pangan dari hasil perikanan.
5. Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan harus segera disahkan, agar dapat secara utuh mewujudkan Mutu dan Keamanan Pangan. Dalam peraturan ini diatur lembaga yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi pengelolaan ikan tangkapan, dan sangat bermanfaat untuk jaminan Keamanan Pangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjon, Philipus M, R. Sri Soemantri Matosoewignyo, et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI. *Analisis Dan Evaluasi Bidang Perikanan: Jakarta*
- Utrecht, E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet.IV
- Kusumaatmadja, Moctar. 1978. *Bunga rampai Hukum Laut*, Bina Cipta: Bandung
- Lembaga Administrasi Negara. 1987. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*
- Ridwan H.R.2006. *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Silalahi, M.Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Alumni: Bandung
- Soekanto, Soerjono.2016. *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press. Jakarta. 1986
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2013 .*Pengantar Hukum Pertanian*, GAPPERINDO: Jakarta
- Southeast Asian Food Science &Technology Center.2007. *Upaya Peningkatan Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan Melalui Ilmu Dan Teknologi*, Intitut Pertanian Bogor: Bogor
- Suharto, Ign. 2015. *Produksi Dan Penanganan Pangan*.UNPAR PRESS: Bandung.
- Suharto, Ign. 2015. *Unit Proses Dalam Sintesis Pangan*, UNPAR PRESS: Bandung,
- Sumardi, Juajir. 1996. *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Tribawono, Djoko.2002. *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Jurnal Ilmiah, Makalah Ilmiah dan Laporan Ilmiah

- Adiwibowo, Yusuf. 2016. *Epistimologi Keamanan Pangan*, YURIDIKA, Vol.31 No.1, Universitas Airlangga
- Aini, Nur. 2017. *Laut Indonesia Tercemar Sampah , Perut Ikan Berisi Plastik*, Republika.co.id, 28 Februari 2017 <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/laut-indonesia-tercemar-sampah-perut-ikan-berisi-plastik/ar-AAAnC9G8?li=BBsX6vh#image=1>
- Departemen Kehakiman RI. 1998. *Penelitian tentang Aspek hukum Kerjasama Regional dan Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut*. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta
- Ermawati, Rahyani, *Konversi Limbah Plastik Sebagai Sumber Energi Alternatif*, Jurnal Riset Industri Vol. V, No. 3, Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian
- Iswari, Rizky Dewi dan Suyud W.Utomo. 2017. *Evaluasi Penerapan Program Adiwiyata Untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan di Kalangan Siswa*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.15, Sekolah Pascasarjana UNDIP
- Jambeck, J.R., Andrady,A., Geyer, R., Narayan, R., Perryman, M., Siegler, T., Wilcox, C., Lavender Lam, K., (2015) *Plastic waste inputs from land into the ocean*, Spreadsheet Containing data from 192 Countries, <http://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput>
- Karuniastuti, Nurheni, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*, Vol.3, [http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2- Bahaya Plastik --- Nurhenu K.pdf](http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-Bahaya_Plastik_---Nurhenu_K.pdf)
- Lasut, Markus Talintukan. 2009. *Proses Biokumulasi dan Biotransfer Merkuri (Hg) pada Organisme Perairan di dalam Wadah Terkontrol*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Manan,Bagir.*Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*.Makalah pada Temu Ilmiah Nasional. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung
- Mark A.Browne etc. 2009. *Micoplastic- an emerging contaminant of potential concern*, Integrated Environmental Assessment an Management, Vol3

- Mintrasih, Tuti Hendrawari. 2016. *Kenijakan Kanton Belanja Plastik Tidak Gratis*, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
- Nomlene, Maksi. 2015. *Rekonstruksi Politik Hukum Pengelolaan Perikanan Laut Berbasaus Kemakmuran Rakyat*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Malang
- Victoria, Agnes Veronica. 2016. *Kontaminasi Mikroplastik di Perairan Tawar*, Jurnal, Teknik Kimia Institut Teknologi, Bandung
- World Health Organization. 1984. *The Role of Food Safety in Health and Development*. Report of a Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Safety, WHO Technical Report Series, No.705, Geneva
- Yusuf, Moh,Baharuddin Hamzah dan Nurdin Rahman. 2013.*Kandungan Merkuri (Hg) Dalam Air Laut, Sedimen, dan Jaringan Ikan Belanak di Perairan Teluk Palu*.Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Palu

Website

- Akbar Tahir, *Anthropogenic Debris in Seafood*, Departemen Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudin, Makasar. <https://maritim.go.id/konten/unggahahan/2017/05/DOC-20170426-WA0006.pdf>
- Biro Informasi dan Hukum, <https://maritim.go.id/kemenko-kemaritiman-dan-kedubes-as-ajak-pelajar-dan-komunitas-blogger-perangi-sampah-laut-2/>
- Directorate of Fisheries. 2007. *Norwegian Fisheries Management*, Ministry of Fisheries and Coastal Affair, Norwegia. www.government.no/fkd
- Draft Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten, http://www.bkipm.kkp.go.id/user_umum/00.3/Draft%20JUKLAK_INPRES%2001_1%20Pdf.pdf
- <http://agromaritim.com/manajemen-perikanan-norwegia-detail-5236>
- Lutfi Fauziah, 2016, *Ikan Lebih Suka Makan Plastik Daripada Plankton*, *Ekosistem Laut Terancam*, National Geographic Indonesia, 7 Juni 2016 (

- sumber: *Independent.co.uk* ,
Huffingtonpost.com) <https://nationalgeographic.co.id/berita/2016/06/ikan-lebih-suka-makan-plastik-daripada-plankton-ekosistem-laut-terancam>
- Lutfi Fauziah, 2017, *Pemakan Seafood Menelan Hingga 11.000 Partikel Plastik Tiap Tahun*, 25 Januari 2017, National Geographic Indonesia <http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/01/pemakan-seafood-menelan-hingga-11-000-partikel-plastik-tiap-tahun>
- Nisrina Darnila, 2016, *Hewan Makan Plastik di Laut Karena Beraroma Seperti Makanan*, National Geographic Indonesia <https://nationalgeographic.co.id/berita/2016/11/hewan-makan-plastik-di-laut-karena-beraroma-seperti-makanan>
- Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, *Pemantauan Air Laut dan Danau di Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup, 2013. <http://www.menlh.go.id/pemantauan-air-laut-dan-danau-di-indonesia/>
- Sandika Prihatnala <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/311700-pencemaran-sampah-plastik-dan-ancaman-bencana-ekologi>